



BADAN PUSAT STATISIK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BIRO KEUANGAN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja eselon II instansi di BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka mencapai sasaran/target di lingkup Biro Keuangan yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Biro Keuangan.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022, capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target Renstra Biro Keuangan 2020-2024, serta penyerapan anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2022. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi Biro Keuangan BPS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang sangat kami hargai.

Jakarta, 27 Januari 2023

BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Keuangan,



Darusman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I - PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	8
Tugas	8
Fungsi	9
Susunan Organisasi	9
1.3. Landasan Hukum	9
1.4. Sumber Daya Manusia	10
1.5. Anggaran	16
1.6. Isu Strategis	16
BAB II - RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	18
Visi	18
Misi	18
Tujuan dan Sasaran Strategis	18
2.2 Indikator Kinerja Utama	20
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2022	21
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	23
SS.1. Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien	23
SS.2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	25
SS.3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	26
SS.4. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas	27
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022	28
3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022	30
BAB IV - PENUTUP	33
4.1. Tinjauan Umum	33
4.2. Tindak Lanjut	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan	9
Gambar 2. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan	11
Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan kualifikasi pendidikan	11
Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan	12
Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	12
Gambar 6. Proporsi Pegawai Menurut Usia	13
Gambar 7. Proporsi Pegawai Menurut Unit Kerja	13
Gambar 8. Proporsi Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsionalnya	14
Gambar 9. Proporsi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsionalnya	15
Gambar 10. Proporsi Pegawai Menurut Rumpun Pendidikannya	16
Gambar 11. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Keuangan 2020-2024	19
Gambar 12. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	20
Gambar 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2022 (Juta Rupiah)	31
Gambar 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan untuk Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 (Juta Rupiah)	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan	21
Tabel 2. Penetapan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022	22
Tabel 3. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Keuangan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2022	23
Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2022	25
Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2022	26
Tabel 6. Tingkat Pencapaian Kinerja Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2022	27
Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas Biro Keuangan Tahun 2022	28
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020 sampai Tahun 2022	29
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Komponen Tahun 2022 (Rupiah)	30
Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2022	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2022 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah ringkasan LAKIP Biro Keuangan Tahun 2022.

- Sasaran Biro Keuangan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari salah satu sasaran strategis Sekretariat Utama BPS yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan”. Pencapaian sasaran program diukur berdasarkan beberapa indikator program yang salah satunya menjadi tanggung jawab Biro Keuangan BPS yaitu: Indikator persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti yang sumber datanya didapat dari Laporan Kegiatan Biro Keuangan.
- Tujuan dan sasaran kerja Biro Keuangan dijabarkan dalam indikator kinerja, meliputi:
 1. Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan.
 2. Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu
 3. Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan
 4. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu
 5. Opini laporan keuangan BPS oleh BPK.
- Secara umum Biro Keuangan telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran dimaksud dengan nilai pencapaian kinerja rata-rata sangat baik dengan persentase rata-rata capaian penyelesaian kegiatan mencapai 103,27 persen.
- Pada aspek keuangan, pencapaian penyerapan anggaran Biro Keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 mencapai Rp254.811.715.847 atau sekitar 99,55 persen dari alokasi total pagu anggaran Unit Kerja Biro Keuangan sebesar Rp255.955.823.000.
- Kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan laporan keuangan yang berkualitas dengan opini WTP BPK RI atas Audit Laporan Keuangan, secara umum meliputi:
 1. Adanya perubahan aturan dan kebijakan bidang keuangan dari Kementerian Keuangan yang memerlukan disusunnya petunjuk teknis dan pelaksanaan baru dalam penerapannya di lingkungan Badan Pusat Statistik.

2. Tingginya tingkat kebutuhan atas SDM pengelola keuangan yang berkualitas di satker pada lingkungan Badan Pusat Statistik, sehingga Biro Keuangan perlu melakukan pembinaan SDM bidang keuangan.
3. Tingginya tingkat kebutuhan atas SDM *programmer* yang berkualitas di Biro Keuangan untuk menunjang pekerjaan yang berbasis teknologi informasi.
4. Proses perpindahan jabatan ke jabatan fungsional tertentu masih terhambat. Hingga akhir tahun 2022, lebih dari 50% pegawai di Biro Keuangan masih berada di jabatan fungsional umum. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain ketidaksesuaian dokumen administrasi, belum lulus pada tahap uji kompetensi, dan syarat pendidikan minimal yang belum memenuhi syarat.
5. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyusunan peraturan/kebijakan/pedoman tentang pengelolaan keuangan.

Walaupun Laporan Keuangan yang disusun oleh Biro Keuangan sejak tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi masih terdapat temuan-temuan yang harus dibenahi oleh Biro Keuangan. Jika hal ini dapat diselesaikan maka kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan akan semakin lebih baik.

Semoga pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2022 dapat memberikan kontribusi nyata di lingkungan Badan Pusat Statistik, terutama dalam upaya kualitas pengelolaan keuangan Badan Pusat Statistik yang lebih baik dan dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas Audit Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik.

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS), dalam mengemban tugasnya dalam menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, tentunya harus didukung dengan pengelolaan administrasi keuangan yang efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Biro Keuangan merupakan unit kerja eselon II BPS yang berada di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

Fungsi Biro Keuangan BPS dijalankan melalui satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen (Dukman) dengan kegiatannya yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan. Adapun sasaran kegiatan yang dirumuskan yaitu (1) Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien, (2) Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien, (3) Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan, dan (4) terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk mengukur keberhasilan Biro Keuangan dalam pencapaian kegiatan tahun 2022, maka pada awal tahun 2022 telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2022. Target tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Keuangan 2022.

Laporan Kinerja Biro Keuangan 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja unit kerja instansi pemerintah. Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Biro Keuangan BPS tahun 2020-2024, sehingga diharapkan laporan ini bisa dapat menjadi bahan acuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan diperbaharui dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Tugas

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.

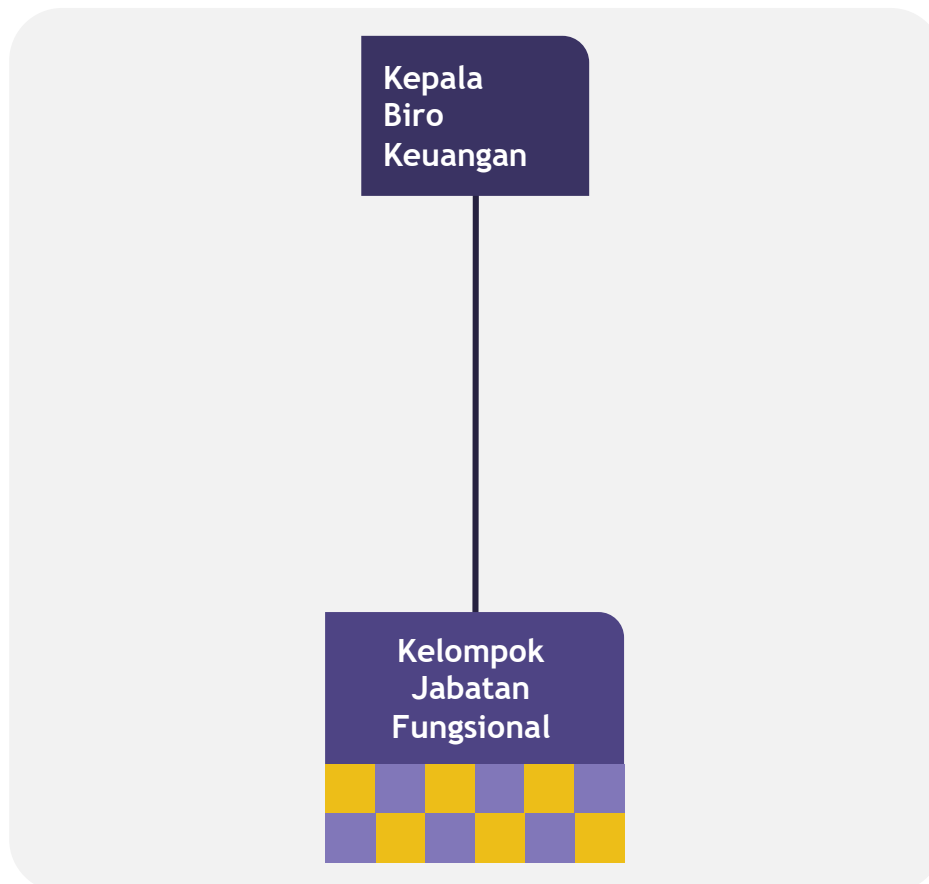
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan administrasi keuangan;
- 2) Pelaksanaan perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan verifikasi; dan
- 4) Pelaksanaan akuntansi.

Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Biro Keuangan, berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik tanggal 17 Desember 2020, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Biro Keuangan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Keuangan

1.3. Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

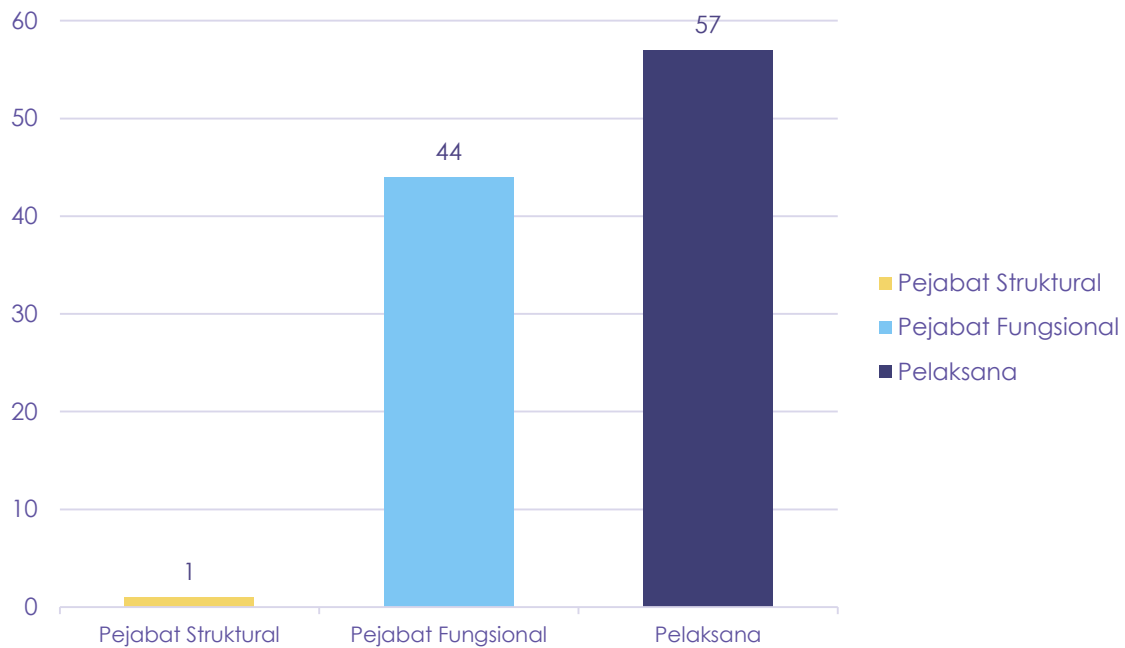
- 1) Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah

maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- 4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- 5) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Sub bidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik dan telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Sub bidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

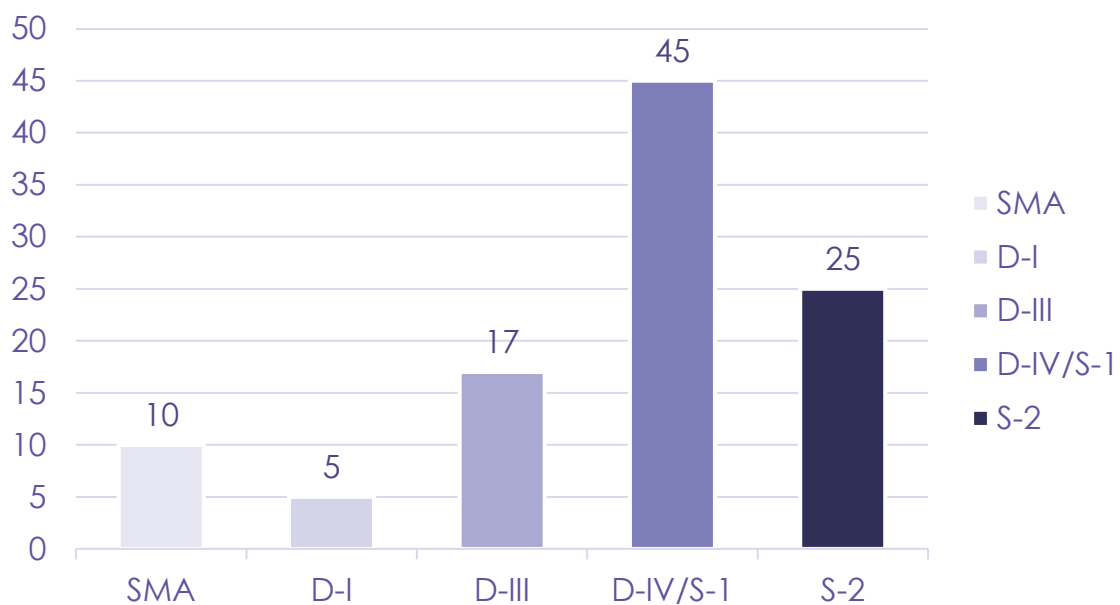
1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, diperlukan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten untuk menentukan keberhasilan organisasi pemerintah. Jumlah pegawai Biro Keuangan pada tahun 2022 adalah 102 (seratus dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro, 44 (empat puluh empat) pejabat fungsional, dan 57 (lima puluh tujuh) orang pelaksana.



Gambar 2. Jumlah Pegawai Biro Keuangan Berdasarkan Kualifikasi Jabatan

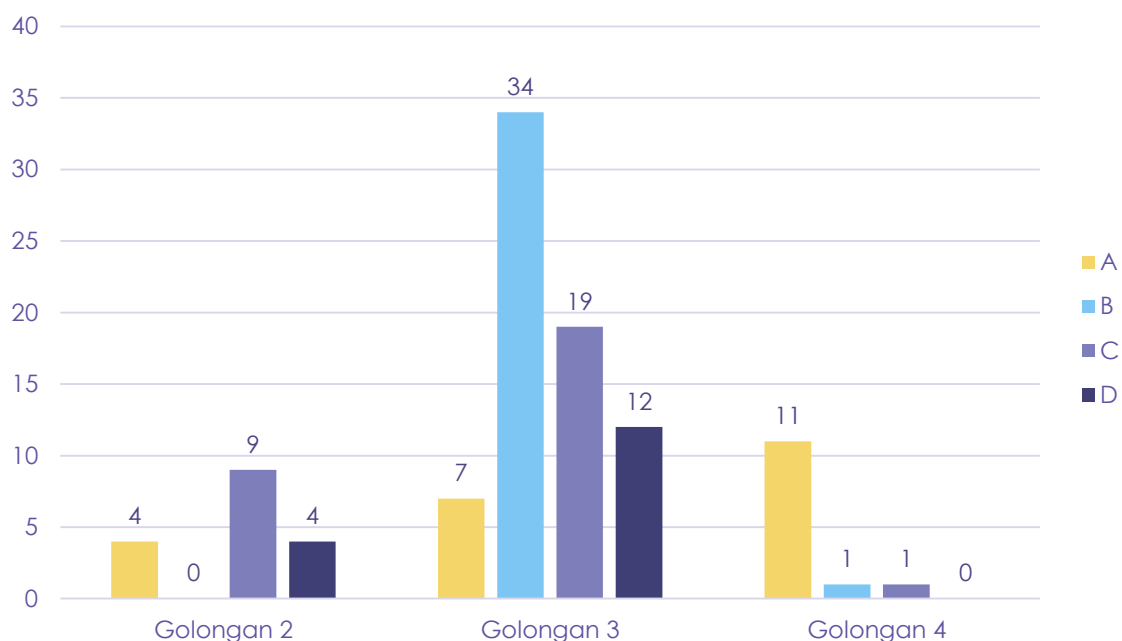
Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3, dari 102 orang pegawai di Biro Keuangan tercatat sebanyak 25 pegawai (24,51 %) berpendidikan S-2, 45 pegawai (44,12 %) berpendidikan D-IV/S-1, 17 pegawai (16,67 %) berpendidikan D-III, 5 pegawai (4,90 %) berpendidikan D-I, dan 10 pegawai (9,80 %) berpendidikan SMA.



Gambar 3. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan kualifikasi pendidikan

Klasifikasi pegawai berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III sebesar 72 orang (70,59 %) dari jumlah PNS sebesar 102 orang. Kemudian untuk golongan II terdapat

17 orang (16,67 %) dan untuk golongan IV terdapat 13 orang (12,75 %) dengan rincian seperti pada tabel berikut:



Gambar 4. Jumlah Pegawai Biro Keuangan berdasarkan Golongan

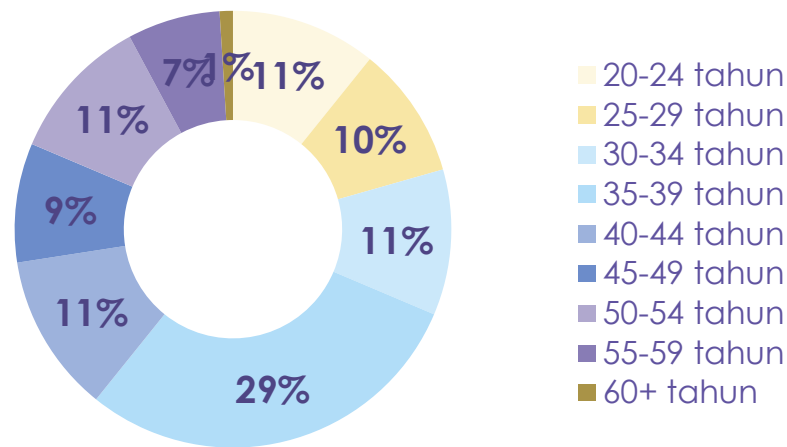
Klasifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari perempuan sebanyak 65 orang dan laki laki sebanyak 37 orang dari jumlah pegawai di Biro Keuangan sebesar 102 orang seperti terlihat pada gambar 5. Hampir di semua tingkatan golongan, pegawai perempuan lebih mendominasi daripada pegawai laki-laki.



Gambar 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

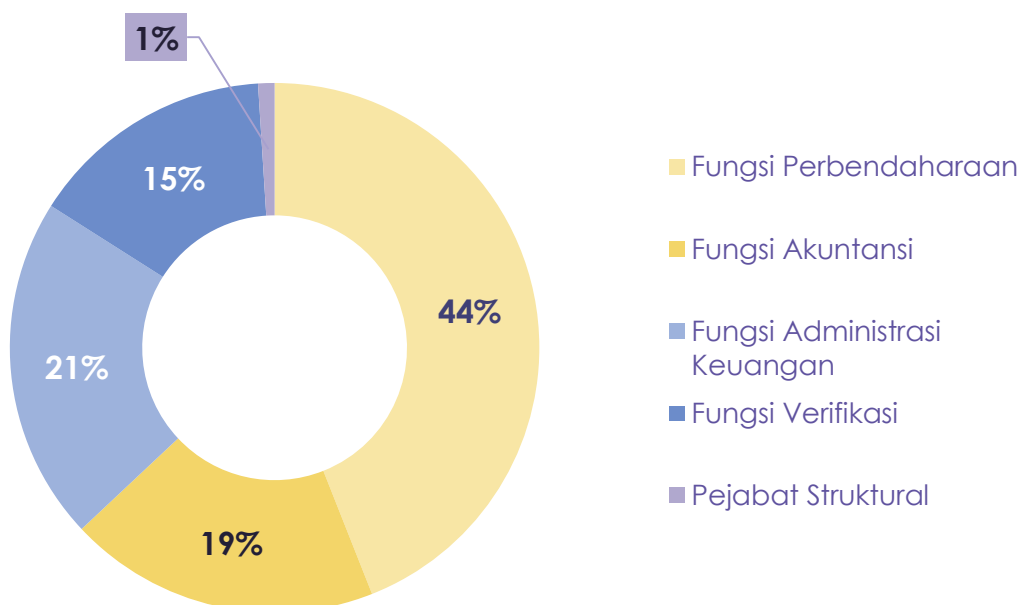
Proporsi pegawai berdasarkan usia didominasi oleh pegawai dengan usia 35-39 tahun seperti yang terlihat pada Gambar 6. Pada Biro Keuangan, terdapat 30 orang (29,41%) pegawai dengan usia 35-39 tahun, sisanya memiliki kategori umur dengan

proporsi 9-11 persen kecuali kategori umur 55-59 tahun dan diatas 60 tahun yang memiliki proporsi sebesar 6,86 dan 0,98 persen.



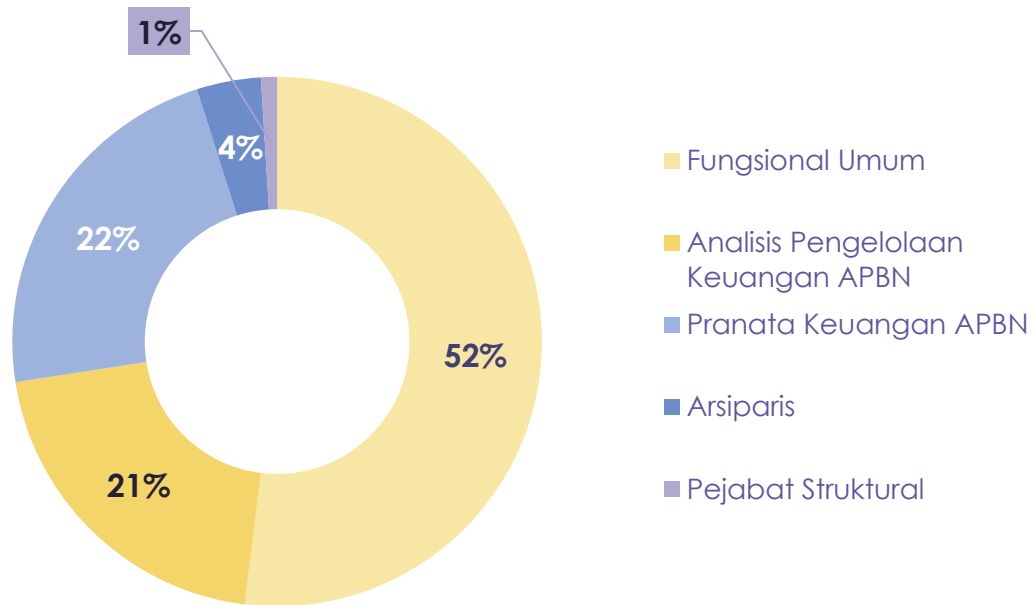
Gambar 6. Proporsi Pegawai Menurut Usia

Jumlah pegawai pada unit kerja Fungsi Administrasi Keuangan sebanyak 21 orang (20,59%), Bagian Akuntansi sebanyak 19 orang (18,63%), Bagian Verifikasi sebanyak 15 orang (14,71%). Sedangkan, jumlah pegawai pada unit kerja Fungsi Perbendaharaan sebanyak 44 orang (43,14%). Perbedaan jumlah pegawai antar unit kerja tersebut sudah disesuaikan dengan beban pekerjaan pada masing-masing unit kerja.



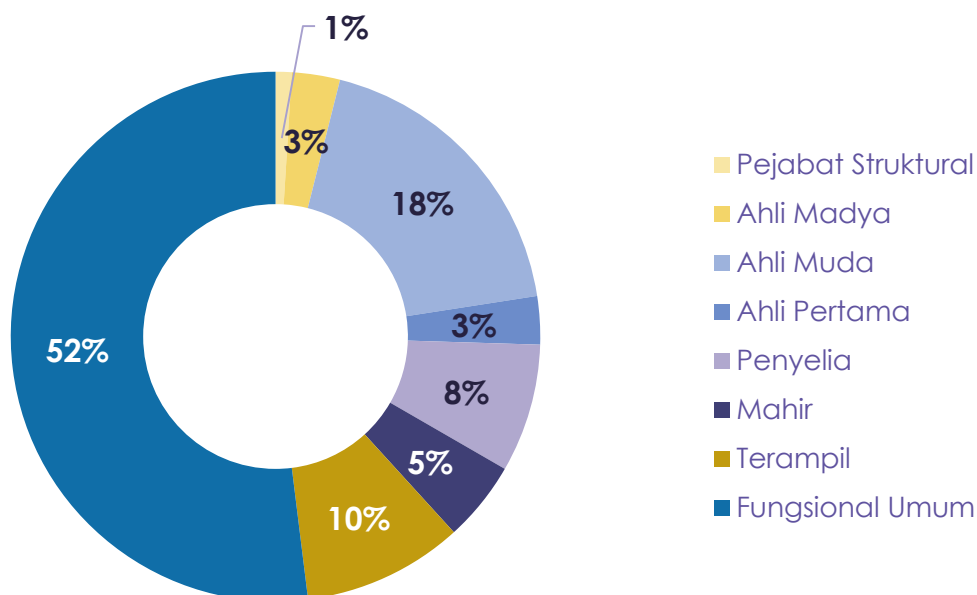
Gambar 7. Proporsi Pegawai Menurut Unit Kerja

Klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan fungsional masih didominasi oleh jabatan fungsional umum sebesar 57 orang (55,88%) dari jumlah PNS sebesar 102 orang. Sebanyak 44 orang (43,14%) lainnya, telah masuk kedalam jabatan fungsional tertentu, antara lain Analis Pengelola Keuangan ABPN sebanyak 21 orang (20,59%), Pranata Keuangan ABPN sebanyak 23 orang (22,55%), dan Arsiparis sebanyak 4 orang (3,92%). Selain itu, terdapat 1 orang (0,98%) pegawai yang merupakan pejabat struktural.



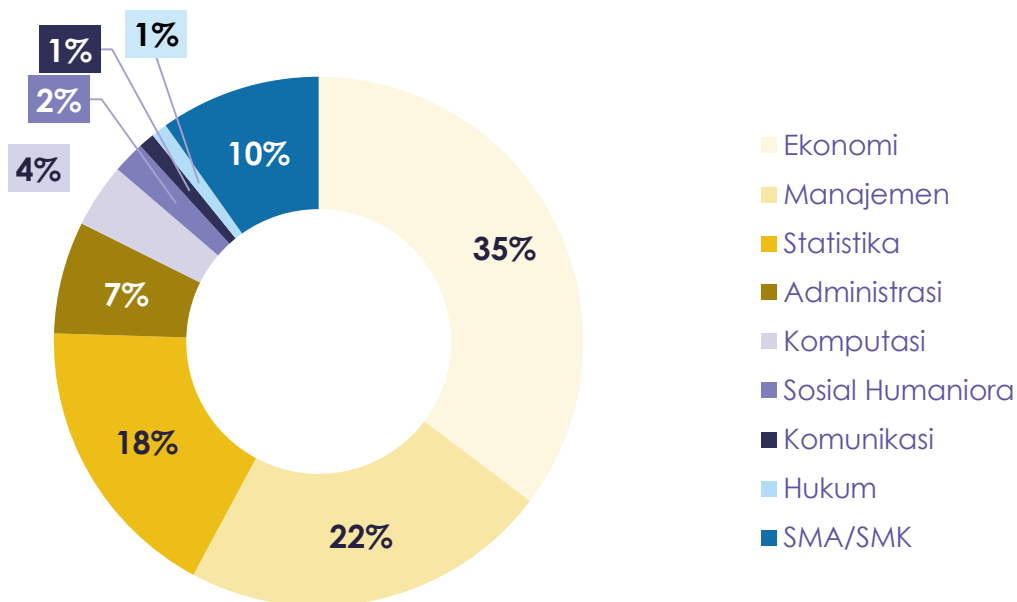
Gambar 8. Proporsi Pegawai Menurut Jenis Jabatan Fungsionalnya

Klasifikasi pegawai berdasarkan jenjang jabatan fungsional masih didominasi oleh jabatan fungsional umum sebesar 53 orang (51,96%) dari jumlah PNS sebesar 102 orang. Terdapat 3 orang (2,94%) berada pada jenjang Ahli Madya, 19 orang (18,63%) berada pada jenjang Ahli Muda, 3 orang (2,94%) berada pada jenjang Ahli Pertama, 8 orang (7,84%) berada pada jenjang Penyelia, 5 orang (4,90%) berada pada jenjang Mahir, dan 10 orang (9,80%) berada pada jenjang Terampil. Selain itu, terdapat 1 orang (0,98%) pegawai yang merupakan pejabat struktural.



Gambar 9. Proporsi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsionalnya

Proporsi pegawai berdasarkan rumpun pendidikan terakhirnya didominasi oleh pegawai dengan rumpun pendidikan ekonomi dan manajemen seperti yang terlihat pada Gambar 10. Jika dijumlahkan, lebih dari setengah pegawai di Biro Keuangan merupakan lulusan ekonomi dan manajemen. Pegawai lulusan ekonomi dan manajemen pada Biro Keuangan sebanyak 36 orang (32,29%) dan 23 orang (22,55%). Kemudian, lulusan statistika sebanyak 18 orang (17,65%), lulusan administrasi 7 orang (6,86%), lulusan komputasi 4 orang (3,92%), lulusan sosial humaniora sebanyak 2 orang (1,96%) dan lulusan komunikasi, serta hukum masing-masing 1 orang (0,98%). Selain itu, masih terdapat pegawai yang berpendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 10 orang (9,80%).



Gambar 10. Proporsi Pegawai Menurut Rumpun Pendidikannya

1.5. Anggaran

Biro Keuangan memiliki pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp255.955.823.000 dengan realisasi sebesar Rp254.811.715.847 atau 99,55 persen. Anggaran Biro Keuangan tahun 2022 terdiri dari belanja penempatan/mutasi pegawai, layanan manajemen keuangan, gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor. Anggaran belanja penempatan/mutasi pegawai sebesar Rp3.852.991.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp 3.848.388.162 atau 99,88 persen, anggaran belanja layanan manajemen keuangan sebesar Rp3.260.692.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp3.149.693.213 atau 96,60 persen, anggaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp247.074.662.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp246.593.337.672 atau 99,81 persen, serta anggaran belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp1.767.478.000 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.220.296.800 atau 69,04 persen.

1.6. Isu Strategis

Kondisi dan tantangan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan aturan dan kebijakan bidang keuangan dari Kementerian Keuangan yang memerlukan disusunnya petunjuk teknis dan pelaksanaan baru dalam penerapannya di lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Tingginya tingkat kebutuhan atas SDM pengelola keuangan yang berkualitas di satker pada lingkungan Badan Pusat Statistik, sehingga Biro Keuangan perlu melakukan pembinaan SDM bidang keuangan.

3. Tingginya tingkat kebutuhan atas SDM *programmer* yang berkualitas di Biro Keuangan untuk menunjang pekerjaan yang berbasis teknologi informasi.
4. Proses perpindahan jabatan ke jabatan fungsional tertentu masih terhambat. Hingga akhir tahun 2022, lebih dari 50% pegawai di Biro Keuangan masih berada di jabatan fungsional umum. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain ketidaksesuaian dokumen administrasi, belum lulus pada tahap uji kompetensi, dan syarat pendidikan minimal yang belum memenuhi syarat.
5. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyusunan peraturan/kebijakan/pedoman tentang pengelolaan keuangan.

BAB II - RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, Biro Keuangan telah menyusun Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 yang tentunya mengacu pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024. Hal tersebut dilakukan agar tujuan dan sasaran Biro Keuangan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Utama. Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Biro Keuangan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Keuangan yang tertuang dalam Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi

Biro Keuangan mempunyai visi yaitu “Pengelola Keuangan yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel”.

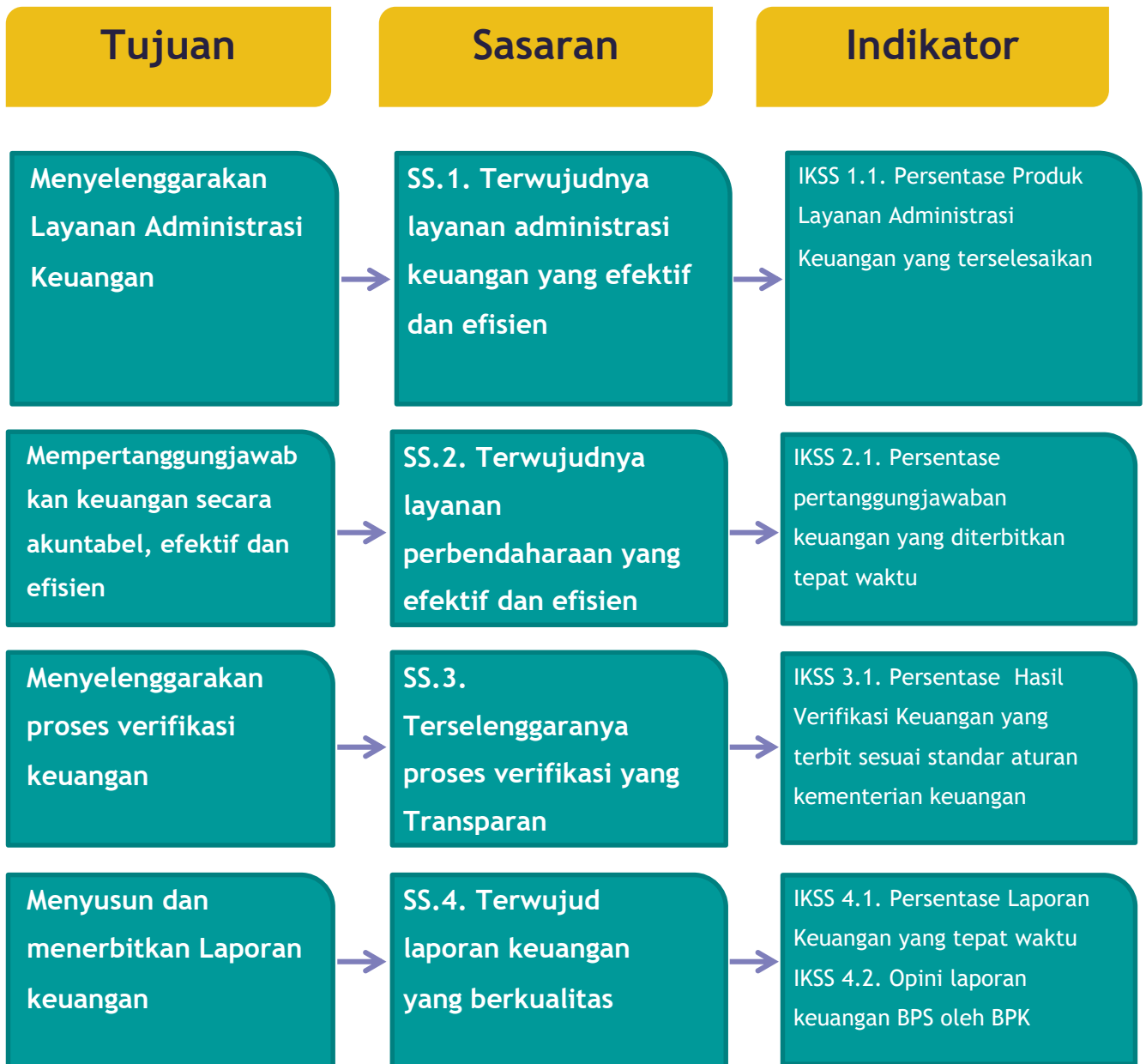
Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Keuangan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien.
- 3) Menyelenggarakan proses verifikasi yang transparan.
- 4) Mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Biro Keuangan mempunyai empat tujuan yang dicanangkan dalam Renstra Biro Keuangan tahun 2020-2024. Tujuan Biro Keuangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.



Gambar 11. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Biro Keuangan 2020-2024

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Keuangan dapat terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 12. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU Biro Keuangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang kemudian diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 . IKU Biro Keuangan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2021	Indikator Kinerja Utama 2022	Penanggung Jawab 2021	Penanggung Jawab 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Setiap Fungsi di lingkungan Biro Keuangan	Setiap Fungsi di lingkungan Biro Keuangan
		-	-	-	-
2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	Fungsi Administrasi Keuangan, Fungsi Perbendaharaan, dan Fungsi Verifikasi.	Fungsi Administrasi Keuangan, Fungsi Perbendaharaan, dan Fungsi Verifikasi.
3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang Transparan	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	Bagian Verifikasi	Fungsi Verifikasi
4.	Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	Laporan Keuangan yang tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	Bagian Akuntansi	Fungsi Akuntansi
		Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Bagian Akuntansi	Fungsi Akuntansi

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Pada awal tahun 2021, Biro Keuangan telah menetapkan target yang harus dicapai dan menjadi ukuran keberhasilan Biro Keuangan dalam memenuhi tugasnya di tahun 2022. Target tersebut dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Keuangan yang merupakan bentuk komitmen Biro Keuangan kepada Sekretaris Utama BPS. Berikut tabel penetapan kinerja Biro Keuangan tahun 2022 untuk masing-masing indikator sasaran.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Presentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Persen	95
2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	Persen	100
3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	Persen	96
4.	Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	Laporan	100
		Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	Skor	WTP (100)

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja Biro Keuangan merupakan perwujudan kewajiban Biro Keuangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Keuangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Biro Keuangan 2022 dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja selama tahun 2022 dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.

Pada tahun 2022, rata-rata capaian kinerja Biro Keuangan terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 103,27 persen.

Tabel 3. Rata-Rata Capaian Kinerja Biro Keuangan Menurut Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien	1	105,10
2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	1	100,00
3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	1	102,48
4. Terwujud laporan keuangan yang berkualitas	2	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja		103,27

SS.1. Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien

Sasaran pertama ini merupakan tugas pokok Biro Keuangan dalam mewujudkan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan terkait proses administrasi bidang keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran kegiatan teknis bidang statistik. Dalam pelaksanaannya, Biro Keuangan menyediakan suatu sistem yang saling terhubung dan terintegrasi pada masing-masing bagian sehingga menghasilkan layanan administrasi keuangan yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

Dalam memberikan layanan administrasi keuangan yang efektif dan efisien, Biro Keuangan tetap mengedepankan *good governance* dalam pengelolaannya. *Good governance* dicapai dengan cara menata kelembagaan pada Biro Keuangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih serta menjaga setiap fungsi berjalan secara maksimal, memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya manusia dengan senantiasa meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai, serta mengikuti secara aktif perkembangan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara.

Rata-rata tingkat capaian sasaran “Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang efektif dan efisien” adalah sebesar 105,10 persen. Sasaran ini dinilai berdasarkan satu indikator kinerja, yaitu Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan. Indikator tersebut dihitung dengan pembagian dari 6 (enam) layanan utama yang dilakukan oleh Biro Keuangan, yaitu persentase pemrosesan administrasi biaya pindah yang terselesaikan, persentase pemrosesan administrasi penghasilan pegawai yang terselesaikan, persentase pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang terselesaikan, persentase pemegang KKP yang terproses, persentase penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK), dan persentase pemrosesan pemberkasan arsip dan penataan arsip keuangan yang terselesaikan.

Presentasi Biaya Pindah yang terselesaikan mendapatkan capaian 100 persen yang meliputi perjalanan pindah pegawai sebanyak 352 pegawai dari pusat ke daerah dan daerah ke pusat, perjalanan pindah pegawai sebanyak 21 pegawai menetap/pension dan pesangon pindah, dan pemulangan jenazah sebanyak 5 pegawai. Semua proses biaya pindah dan pemulangan jenazah telah selesai dilakukan pembarayaran.

Persentase pemrosesan administrasi penghasilan pegawai (ASN dan PPNP) mendapatkan capaian 99,52 persen, termasuk di dalamnya selain gaji unduk selama 14 bulan adalah pembayaran tunjangan kinerja 12 dan uang makan 12 bulan. Penghasilan PPNP juga diproses disini sebanyak 12 bulan.

Persentase pemrosesan tuntutan ganti rugi (TGR) yang terselesaikan mendapatkan capaian 99,57 persen dari total 24 kasus yang ditindaklanjuti. Untuk TGR jenis kasus wanprestasi Ikatan Dinas/Tugas Belajar terdapat 6 (enam) kasus baru di tahun 2022. Untuk TGR jenis kasus kehilangan kendaraan roda dua terdapat 11 (sebelas) kasus baru di tahun 2022 dan untuk TGR jenis kasus kehilangan barang inventaris kantor terdapat 7 (tujuh) kasus baru di tahun 2022.

Persentase KKP yang terproses untuk diterbitkan KKP mendapatkan capaian 100 persen dari jumlah KKP yang telah diusulkan. Keadaan sampai dengan tanggal 30 November 2022 terdapat 34 (tiga puluh empat) KKP yang aktif dan untuk menghadapi

Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) maka dilakukan blokir sementara yang akan dibuka lagi pada awal tahun 2023.

Persentase penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) yang terselesaikan mendapat capaian 100 persen dari 5 PAK yang telah diusulkan dan ditindaklanjuti pada tahun 2022. PAK terdiri dari Sensus Penduduk Long Form 2020, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, Gladi Bersih Sensus Pertanian 2023, Peraturan Kepala BPS Perjalanan Dinas Jabatan dan Peraturan Kepala BPS Pembayaran Non Tunai.

Persentase pemrosesan pemberkasan arsip dan penataan arsip keuangan yang terselesaikan mendapatkan capaian 100 persen, dari pemberkasan arsip dokumen yang masuk sebanyak 2504 dan penerbitan SP2D (arsip dari Biro keuangan dan ULP) sebanyak 2504. Sedangkan dari target Penataan 12 Provinsi yang selesai ditata sebanyak 12 Provinsi.

Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Layanan Administrasi Keuangan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2022

Indikator		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	95	99,85	105,10
Rata-Rata Capaian Kinerja				105,10

SS.2. Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien

Sasaran terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien pada tahun 2022 rata-rata capaian sebesar 100 persen dari perhitungan 1 (satu) indikator persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu. Indikator tersebut dihitung dengan pembagian dari 3 (tiga) layanan utama yang dilakukan oleh Biro Keuangan dalam hal perbendaharaan, yaitu persentase dokumen pertanggungjawaban keuangan yang telah diproses menjadi SPP, persentase laporan keuangan yang diterbitkan selama setahun, dan persentase penerimaan negara yang telah disetorkan ke kas negara dari seluruh penerimaan negara yang masuk ke rekening bendahara.

Persentase pemrosesan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang terselesaikan mendapatkan capaian 100 persen dari total 3.637 dokumen yang masuk. Total semua SPP yang telah diproses tersebut merupakan total akumulasi dari 23 Kegiatan

yang ada di tahun 2022. Target laporan yang dibuat oleh masing-masing BPP setiap bulannya juga tercapai 100 persen, dimana setiap BPP setiap bulan membuat dan melaporkan LPJ BPP.

Sasaran kedua ini adalah perwujudan dari tujuan pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu. Dalam mewujudkan tujuan ini, maka setiap proses realisasi belanja dan pendapatan dilaksanakan secara cepat, teliti, transparan, dan didukung oleh dokumen sumber terkait yang andal. Setiap tahapan proses pelaksanaan layanan dilakukan secara hati-hati tanpa mengabaikan kecepatan dan ketepatan proses serta didukung otorisasi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan layanan ini, Biro Keuangan telah melakukan beberapa inovasi. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Biro Keuangan yaitu penggunaan aplikasi *smart office* dalam pemantauan pertanggungjawaban keuangan untuk memudahkan penelusuran jejak dokumen pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja yaitu Satuan Kerja Sekretariat Utama dan terkoordinasinya pendokumentasian pertanggungjawaban keuangan dengan Fungsi Administrasi Keuangan sehingga memudahkan untuk pencarian dokumen pertanggungjawaban keuangan saat pemeriksaan intern dan ekstern.

Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Layanan Perbendaharaan yang Efektif dan Efisien Biro Keuangan Tahun 2022

Indikator		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	100	100	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja				100,00

SS.3. Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan

Sasaran ketiga adalah terselenggaranya proses verifikasi keuangan yang transparan. Sasaran ini diwujudkan dengan proses pemeriksaan setiap dokumen keuangan yang dihasilkan dari proses pelaksanaan anggaran dilakukan secara sistematis dan transparan. Proses verifikasi keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan baik dalam jumlah, peruntukannya, dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Pada tahun 2022, sasaran terselenggaranya proses verifikasi yang transparan terealisasi sebesar 98,38 persen. Jumlah SPP yang terbit sebanyak 3.700 SPP. SPP tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sehingga layak diterbitkan SPM. Jumlah SPM yang terbit selama 2022 sebanyak 3.640 SPM, selisihnya adalah jumlah SPP yang batal. Berdasarkan renstra tahun 2020-2024, pada tahun 2022 target indikator Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan adalah 96 persen, sehingga capaian kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2022 adalah 102,48 persen.

Tabel 6. Tingkat Pencapaian Kinerja Terselenggaranya Proses Verifikasi yang Transparan pada Biro Keuangan Tahun 2022

Indikator		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Hasil Verifikasi Keuangan yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	96	98,38	102,48
Rata-Rata Capaian Kinerja				102,48

SS.4. Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas

Sasaran keempat adalah terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada BPS.

Biro Keuangan sebagai unit yang mengelola keuangan BPS melaksanakan proses akuntansi dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pada setiap akhir periode pelaporan keuangan, laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh Biro Keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan tersebut berupa opini. Opini yang ditargetkan untuk dicapai pada setiap akhir pelaksanaan APBN

adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Lalu, persentase laporan keuangan yang harus terbit tepat waktu pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 persen.

Pada tahun 2022, sasaran terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas mendapatkan capaian sesuai target, yaitu sebesar 100 persen. Capaian ini dicapai karena kedua capaian nilai indikator dari sasaran ini mendapat nilai 100 persen. Jumlah laporan keuangan tingkat satker, wilayah, dan instansi yang terbit tepat waktu selama tahun 2022 berjumlah 1.657 yang terdiri dari 552 laporan pada periode unaudited 2021, 1 laporan pada periode audited 2021, 552 laporan pada periode semester I tahun 2022, dan 552 laporan pada periode triwulan III tahun 2022. LK dikirim secara berjenjang pada internal BPS dan dikirim ke pihak eksternal yaitu Kemenkeu sesuai dengan jadwal pada surat penyusunan LK K/L yang diterbitkan oleh Kemenkeu. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) BPS pada tahun 2022 adalah LK K/L BPS TA 2021. LK K/L ini telah diperiksa oleh BPK dan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 7. Tingkat Pencapaian Kinerja Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas Biro Keuangan Tahun 2022

Indikator		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	100	100	100,00
2.	Opini laporan keuangan BPS oleh BPK	WTP (100%)	WTP (100%)	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja				100,00

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Biro Keuangan Tahun 2020 sampai Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra			Realisasi			Capaian Thd Target (%)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Layanan Administrasi keuangan yang efektif dan efisien	Persentase TGR yang ditindaklanjuti	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
		Jumlah aplikasi yang didukung penerapan smart office yang digunakan untuk pelayanan	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
		Persentase Produk Layanan Administrasi Keuangan yang terselesaikan	-	85,00	95,00	-	98,15	99,85	-	114,21	105,10
2.	Terwujudnya layanan perbendaharaan yang efektif dan efisien	Jumlah laporan keuangan Satker Sestama yang tepat waktu	5	-	-	5	-	-	100,00	-	-
		Persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
3.	Terselenggaranya proses verifikasi yang transparan	Persentase SPM yang terbit sesuai standar ketentuan	95,00	-	-	74,08	-	-	77,98	-	-
		Persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan	-	96,00	96,00	-	99,04	98,38	-	103,17	102,48
4.	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas	Laporan Keuangan yang tepat waktu	-	517	-	-	517	-	-	517	-
		Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
		Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)	WTP (100%)

Jika membandingkan realisasi tahun 2022 terhadap periode 2021, capaian kinerja 5 (lima) indikator yang mewakili kinerja Biro Keuangan untuk Periode Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

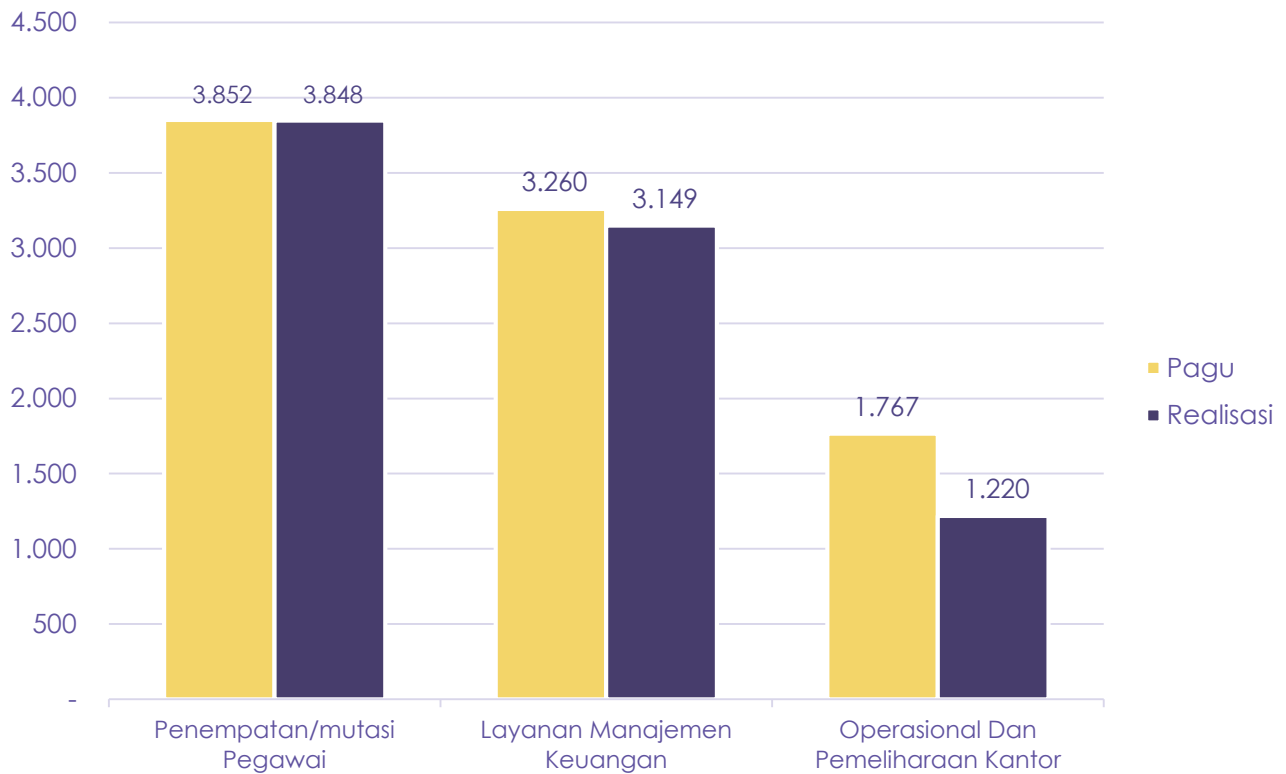
1. Terdapat perbedaan satu indikator antara tahun 2022 dengan tahun 2021 pada sasaran strategis “Terwujudnya Laporan Keuangan yang Berkualitas” yaitu Laporan Keuangan yang tepat waktu diubah menjadi Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu. Indikator pada tahun 2021 menggunakan satuan jumlah, sementara indikator tahun 2022 menggunakan satuan persentase.
2. Keseluruhan 5 (lima) indikator, yaitu persentase produk layanan administrasi keuangan yang terselesaikan, persentase pertanggungjawaban keuangan yang diterbitkan tepat waktu, persentase SPM yang terbit sesuai standar aturan kementerian keuangan, persentase laporan keuangan yang tepat waktu, dan opini laporan keuangan BPS oleh BPK telah mencapai target kerjanya.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

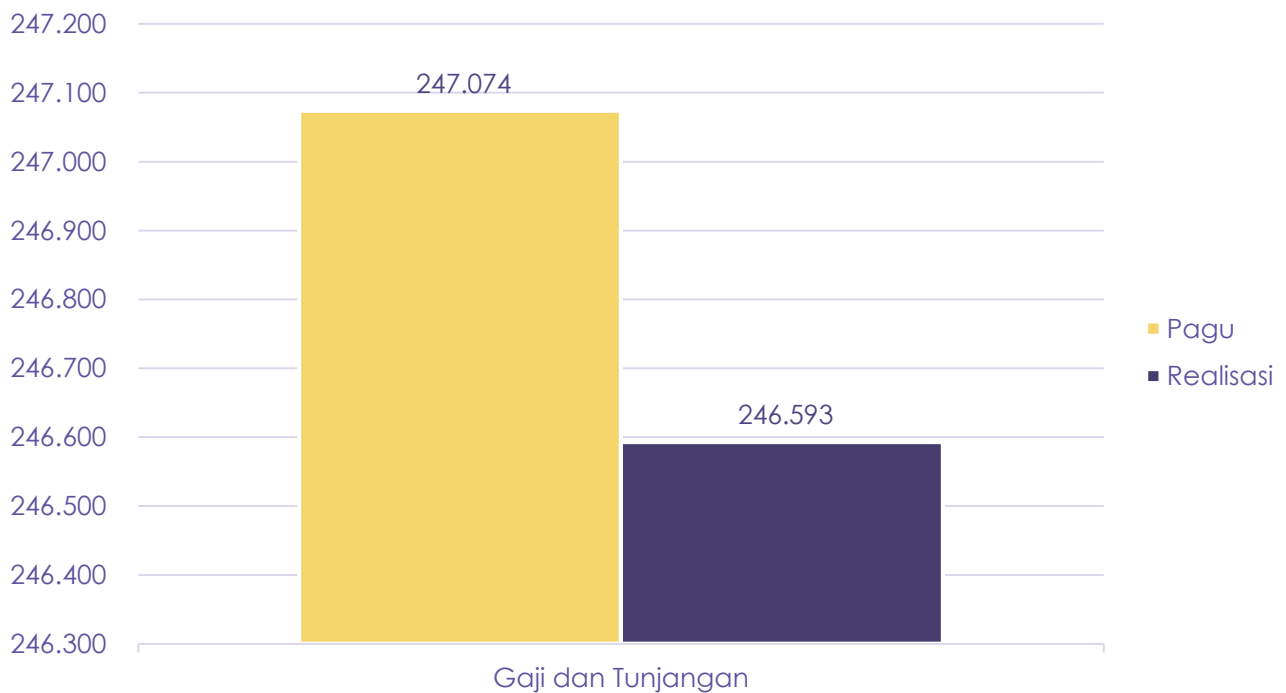
Pada tahun anggaran 2022, Biro Keuangan menerima pagu anggaran sebesar Rp255.955.823.000 dengan realisasi sebesar Rp254.811.715.847 atau 99,55 persen. Anggaran pada Biro Keuangan terdiri dari belanja untuk penempatan/mutasi pegawai, layanan manajemen keuangan, anggaran gaji dan tunjangan serta belanja operasional dan pemeliharaan kantor. Anggaran penempatan/mutasi pegawai sebesar Rp3.852.991.000 dengan realisasi sebesar Rp3.848.388.162 atau 99,88 persen, anggaran layanan manajemen keuangan sebesar Rp 3.260.692.000 dengan realisasi sebesar Rp3.149.693.213 atau 96,60 persen, anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp247.074.662.000 dengan realisasi sebesar Rp246.593.337.672 atau 99,81 persen, dan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp1.767.478.000 dengan realisasi sebesar Rp1.220.296.800 atau 69,04 persen.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Komponen Tahun 2022 (Rupiah)

Komponen	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penempatan/Mutasi Pegawai	3.852.991.000	3.848.388.162	99,88
Layanan Manajemen Keuangan	3.260.692.000	3.149.693.213	96,60
Gaji dan Tunjangan	247.074.662.000	246.593.337.672	99,81
Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.767.478.000	1.220.296.800	69,04
Jumlah	255.955.823.000	254.811.715.847	99,55



Gambar 13. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan Menurut Jenis Belanja Tahun 2022 (Juta Rupiah)



Gambar 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan untuk Gaji dan Tunjangan Tahun 2022 (Juta Rupiah)

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensi penganggaran. Artinya setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran Biro Keuangan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah, terlihat bahwa Biro Keuangan mampu melakukan efisiensi pada seluruh sasaran strategis.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2022

Tahun	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)
2022	103,27	99,55

BAB IV - PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan BPS tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 103,27 persen. Berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu terus dilakukan oleh Biro Keuangan. Untuk tahun 2022, penyerapan anggaran Biro Keuangan pada Program Dukungan Manajemen (Dukman) mencapai 99,55 persen.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai alat penilaian serta kendali atas pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan masukan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Secara umum tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja mencapai 103,27 persen. Dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, capaian sasaran utama dari indikator *outcome* Biro Keuangan untuk mendukung sasaran program Sekretariat Utama BPS terkait “Meningkatnya Tata Kelola Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan” untuk tahun 2022, bisa terlihat pada opini BPK-RI atas Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2021 mendapat opini WTP dari BPK. BPS mampu mempertahankan opini WTP sejak tahun 2016.

Namun, hasil yang diperoleh harus tetap perlu dievaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan kegiatan Biro Keuangan pada waktu yang akan datang. Adapun pencapaian penyerapan anggaran Biro Keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 mencapai 99,55 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama yang mencapai 99,60 persen di tahun 2021. Penurunan pencapaian penyerapan anggaran terjadi pada komponen operasional dan pemeliharaan perkantoran. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan aturan pemberian honor bagi pejabat fungsional pengelola keuangan yang semula 100,00 persen menjadi 40,00 persen dan adanya kebijakan pengurangan jumlah pengelola keuangan.

4.2. Tindak Lanjut

Dari capaian kinerja yang sudah diraih Biro Keuangan BPS pada tahun 2022, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk kedepannya yaitu lebih meningkatkan pelayanan di bidang keuangan sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa aspek yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja Biro Keuangan BPS pada tahun 2022. Beberapa hal tersebut dituangkan dalam kegiatan sehingga aspek pencapaiannya dalam pemenuhan di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan, antara lain:

1. Perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi untuk SDM yang ada saat ini baik melalui proses pendidikan maupun pelatihan yang sesuai dan memadai. Secara khusus, perlu dilakukan pelatihan bagi seluruh SDM Biro Keuangan terkait aplikasi keuangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan aplikasi-aplikasi *smart office* yang dibuat oleh BPS ataupun pihak lainnya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran yang tertib di lingkup Biro Keuangan dan juga mempermudah pelaksanaan pembinaan keuangan satuan kerja di lingkungan BPS khususnya dalam penggunaan aplikasi keuangan. Selain itu, pembagian tugas dan penugasan untuk masing-masing pegawai mungkin harus disusun ulang, agar pembagian tugas seimbang dan tepat. Dengan demikian potensi tiap-tiap pegawai bisa digunakan dengan maksimal.
2. Sebagai arah perubahan jabatan di Biro Keuangan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, perlu diperbanyaknya peningkatan kompetensi/pelatihan/diklat keuangan, pemberian kesempatan belajar di sektor keuangan, atau perbanyak pegawai lulusan rumpun pendidikan keuangan di biro keuangan untuk mengisi formasi yang ada. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi dengan lembaga pembina jabatan fungsional perbendaharaan (Kementerian Keuangan) mengenai penambahan butir-butir pekerjaan pada Biro Keuangan BPS ke butir-butir pekerjaan jabatan fungsional perbendaharaan.
3. Perlu dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan. Sebisa mungkin pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Rencana Aksi yang sudah dilakukan perlu dilanjutkan, namun harus ada kerja sama dan koordinasi dari semua unit di Biro Keuangan, sehingga tidak ada sasaran kegiatan yang tumpang tindih atau bentrok jadwal pelaksanaannya. Adapun rencana kerja yang sudah disusun ini harus siap untuk disesuaikan setiap saat, bilamana memang muncul perubahan prioritas pekerjaan.

4. Perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di internal Biro Keuangan untuk segera bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak yang tepat. Jika memang ada perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan, maka penjadwalan ulang semua kegiatan harus dilakukan dengan segera, sehingga semua target capaian kinerja bisa dipenuhi.
5. Koordinasi yang berkesinambungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan yang telah berjalan dengan baik harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan prestasinya untuk tahun-tahun yang akan datang.
7. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyusunan peraturan/kebijakan/pedoman tentang pengelolaan keuangan sedang dalam proses penyelesaian.

Pada akhirnya, diharapkan LAKIP Biro Keuangan ini akan memberikan gambaran riil atas pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2022. Semoga hasil evaluasi yang dituangkan dalam LAKIP ini dapat berguna sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Keuangan untuk tahun-tahun yang akan datang.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046,

Homepage: <https://bps.go.id/> Mailbox: bpshq@bps.go.id